



APRESIASI BIMBINGAN TEKNIS UNIT AKUTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN SISTIM AKUTANSI BARANG MILIK NEGARA

M. Tajudin dan Endang Sutisna

Balai Penelitian Tanaman Obat dan Aromatik

Bimbingan Teknis Unit Akutansi Kuasa Pengguna Anggaran dan Sistem Akutansi Barang Milik Negara di buka oleh Sekretariat Jenderal Departemen Pertanian yang diikuti oleh 48 peserta dari 34 instansi pemerintah. Dari tanggal 20 - 23 September 2006. di Hotel Safari Garden.

Tujuan pelaksanaan bimbingan ini sesuai sambutan sekjen Deptan adalah dalam rangka upaya lebih memahami dan meningkatkan ketrampilan sistem aplikasi akutansi instansi baik ketrampilan pengelola keuangan dan perlengkapan dalam operasional aplikasi SAKPA dan SAKPB, maupun pengetahuan dalam hal akutansi keuangan dan barang. (SAI) pada tingkat UAKPA (Unit Akutansi Kuasa Pengguna Anggaran), UAPPAW (Unit Akutansi Pembantu Pengguna Anggaran

Wilayah), UAPPA-E1 (Unit Akutansi Pembantu Penguasa Anggaran Eselon I) dan UAPA (Unit Akutansi Pengguna Anggaran). Dalam rangka untuk memahami aplikasi Sistim Akutansi Instansi (SAI) pada tingkat satuan kerja yang dimulai dari Unit Akutansi Kuasa Pengguna Anggaran. Entitas pelaporan dan Akutansi dibentuk untuk mewujudkan pengintegrasian laporan pertanggung jawaban kinerja pada laporan keuangan dengan tujuan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat memenuhi kebutuhan kelompok pengguna, baik untuk keperluan perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan, guna mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi dalam rangka pengelola dana dekonsentrasi/ tugas perbantuan ditingkat pusat



dan daerah, tujuan dari sistem akuntansi instansi adalah :

- a. Menjaga asset pemerintah pusat termasuk yang ada di K/L melalui pencatatan, pemrosesan dan pelaporan transaksi keuangan yang konsisten sesuai standar dan praktek akuntansi yang diterima secara umum.
- b. Menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang anggaran dan kegiatan keuangan K/L yang berguna sebagai dasar penilaian kinerja untuk menentukan ketaatan terhadap otorisasi anggaran dan tujuan akuntabilitas
- c. Menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang posisi keuangan suatu K/L
- d. Menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan, pengelola dan pengendalian kegiatan dan keuangan pemerintah secara efisien.

Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA)

Adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisarian

sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada tingkat satuan kerja dan kementerian/ lembaga.

Keluaran yang diharapkan adalah terciptanya sistem laporan yang akurat dan terpadu berdasarkan standar akuntansi Pemerintah untuk mendukung penyelenggaraan mandat penelitian. Program Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA) Tahun 2007

1. Entri, edit dan print-out anggaran pada DIPA Tahun Anggaran 2007.
2. Entri, edit dan print-out SPM yang telah diterbitkan SP2D-nya (Surat Perintah Pencairan Dana) kedalam aplikasi SAI-SAKPA
3. Laporan Bulanan Realisasi Anggaran dan Neraca Tahun Anggaran 2007.
4. Laporan Triwulan Realisasi Anggaran dan Neraca Tahun Anggaran 2007.
5. Laporan Semesteran Realisasi Anggaran dan Neraca serta Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2007.
6. Laporan Akhir Tahun Realisasi Anggaran dan Neraca



serta Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2007.

7. Mengikuti Pertemuan/Workshop dalam rangka penyusunan Neraca tingkat satuan kerja, oleh UAPPA-E1, UAPPA-W, UAPA dan Puslitbang Perkebunan.

Hasil output Sistem Akuntansi Kuasa Penggunaan Anggaran (SAKPA), adalah berupa :

1. Laporan Realisasi Anggaran Per Satuan Kerja
2. Laporan Realisasi Belanja Satuan Kerja
3. Laporan Realisasi Pengembalian Belanja Satuan Kerja
4. Laporan Realisasi Pendapatan Satuan Kerja
5. Laporan Realisasi Pengembalian Pendapatan Satuan Kerja
6. Neraca Percobaan
7. Neraca Akhir. (Hasil Kompilasi integrasi antara data keuangan SAKPA dengan data Barang Milik Negara SABMN)
8. Daftar Transaksi DIPA, SPM, SSBP dan SSP.
9. Catatan Atas Laporan Keuangan
10. Pernyataan Tanggung Jawab KPA

Sistem Akutansi Kuasa Pengguna Barang (SAKPB)

Secara umum, barang adalah bagian dari kekayaan yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai/dihitung/diukur/ditimbang dan dinilai yang tidak termasuk uang dan surat berharga.. Dalam prakteknya Sistem Akutansi Keuangan dan Sistem Akutansi Barang dilaksanakan secara simultan dalam rangka menyusun laporan pertanggung jawaban kementerian negara/lembaga. Dengan demikian sistem akutansi keuangan dan sistem akutansi barang milik negara merupakan sub dan sistem instansi (SAI). Ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan dalam pengelolaan Sistem Akutansi Kuasa Pengguna Barang (SAKPB) yaitu mencatat, membukukan, melaporkan baik yang ada dikantor maupun diluar kantor barang bergerak dan barang tidak bergerak pada semester I dan semester II yaitu berupa Tanah, Peralatan dan mesin, Jalan dan Jembatan, Gedung dan bangunan.

Program Sistem Akutansi Kuasa Pengguna Barang (SAKPB) Tahun 2007 :



Serba-Serbi

- a. Mendata Ulang Asset Tanah, Gedung dan bangunan serta Aset Ineventaris lainnya selama ini menjadi sorotan BPK tentang temuan asset negara yang tidak sesuai antara data fisik dengan data yang ada Buku Inventaris dan data yang dilaporkan ke Departemen Keuangan sehingga mempengaruhi jumlah nilai uang dalam laporan Sistim Akutansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA)
- b. Mengentry dan menyesuaikan barang inventaris antara buku inventaris dengan data yang ada dilapangan.
- c. Mengikuti Work Shop, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis tingkat pusat (Eselon I dan Eselon II serta unit Akutansi Wilayah (UAKPA-W)). dalam pertanggung jawaban pembuatan laporan baik SAKPA atau SAKPB
- d. Pengecekan Barang inventaris baik yang ada di Balittro maupun yang ada di kebun percobaan khusus menyangkut asset tanah yang sering dikuasai oleh masyarakat.
- e. Pembuatan laporan bulanan, triwulan dan semesteran serta laporan tahunan yang diminta sesuai jadwal yang telah ditentukan
- f. Pembuatan Kartu Induk Barang, Daftar Induk Ruang-an, dan pemberian label pada barang inventaris kantor. yang mengikuti aturan ketentuan tingkat Departemen Pertanian

Saran dan Pertimbangan

Untuk kebutuhan tersebut di atas perlu ditunjang sarana dan prasana yang memadai sehingga akan memperlancar dan mempermudah dalam sistem pelaporan baik SAKPA maupun SAKPB sesuai surat dari Menteri Pertanian (terlampir). Karena konsekuensi keterlambatan laporan atau tidak sesuainya data antara laporan Sistem Akutansi Kuasa Pengguna Anggaran dan Sistem Akutansi Pengguna Barang akan berdampak terhadap ditahannya SP2D dan pengurangan anggaran oleh tingkat pusat.

Kebutuhan anggaran yang cukup (sambutan Sekjen Deptan) sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan



Serba-Serbi

dan Neraca mulai dari tingkat Satker sampai tingkat UAPA (Departemen/Kementrian), karena pada tahun anggaran 2005 dan 2006 Departemen Pertanian dalam

laporan keuangan berdasarkan hasil pemeriksaan BPK mendapatkan Opini "*Desclaemer*"

The Palest Ink Is Better Than The Best Memory

(Tinta yang kabur sekalipun lebih baik dari pada ingatan yang tajam)